

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan ujung tombak dari suatu negara, maju atau tidaknya sebuah negara, sangat tergantung pada kondisi pendidikannya, semakin berkembang pendidikan disuatu negara, maka semakin besar dan maju negara tersebut. Negara akan maju dan berkembang bila sektor pendidikan menjadi skala prioritas. Negara besar dan berkembang menyadari bahwa pembangunan sektor pendidikan sangat perlu di nomor satukan. Proses pendidikan tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan. Pembangunan itu sendiri bertujuan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas serta berpotensi, karena faktor utama terbentuknya suatu negara yang kuat adalah mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas.

Pendidikan adalah suatu usaha sadar untuk menumbuhkembangkan potensi sumber daya manusia melalui kegiatan pengajaran. Sedangkan menurut Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/73) dikatakan bahwa, pendidikan pada hakikatnya adalah

“usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup.”¹

Pendidikan dalam era globalisasi saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pendidikan pada hakikatnya adalah memanusiakan manusia. Pendidikan bermaksud membantu peserta didik untuk menumbuhkembangkan potensi-potensi kemanusiaannya.

Berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 yaitu “mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.”²

Hal ini dibarengi dengan mulainya pemerintah Indonesia untuk melirik pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Salah satu indikatornya adalah telah disetujui oleh MPR untuk memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN atau APBD sesuai dengan UUD 1945 yang telah diamandemen seperti yang tertuang dalam pasal 31 ayat 4 tentang Pendidikan.

Investasi merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi. Investasi dapat berupa investasi modal fisik maupun investasi modal manusia. Investasi fisik (*physical investment*) yakni semua pengeluaran yang dapat menciptakan modal baru (Mankiw, 2000:24) atau

¹ Ketetapan MPR-RI no. IV/MPR/73. Garis-Garis Besar Haluan Negara. Departemen Penerangan Republik Indonesia. h.58

² UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

meningkatkan stock barang modal. Sedangkan investasi sumber daya manusia (*human capital investment*) dapat berupa nilai-nilai pembelajaran dan pengalaman yang ada dalam diri tenaga kerja seperti peningkatan produktivitas dan pendapatan. Beberapa bentuk investasi sumber daya manusia dapat berupa pendidikan, kesehatan maupun migrasi (Schultz, 1961).³

Peranan investasi fisik dalam memacu pertumbuhan ekonomi sudah tidak perlu diragukan lagi. Sementara itu pendidikan dan kesehatan merupakan faktor penting dalam pembangunan manusia. Dalam hal ini, pendidikan dan kesehatan akan berdampak pada kualitas modal manusia.

Tabel 1.1

Perkembangan PDB Indonesia Atas Dasar Harga Konstan

Tahun	Produk Domestik Bruto (PDB) dalam milyar rupiah
2000	Rp. 1389769,9
2001	Rp. 1440405,7
2002	Rp. 1505216,4
2003	Rp. 1577171,3
2004	Rp. 1656516,8
2005	Rp. 1750815,2
2006	Rp. 1847126,7

³ Achmad Sjafii, Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya p.59

2007	Rp. 1964327,3
2008	Rp. 2082456,1
2009	Rp. 2178850,4

Sumber : Biro Pusat Statistik

Langkah ini merupakan awal kesadaran pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Sedikitnya ada tiga alasan untuk memprioritaskan pendidikan sebagai investasi jangka panjang, yaitu:

1. Pendidikan adalah alat untuk perkembangan ekonomi dan bukan sekedar pertumbuhan ekonomi. Secara umum terbukti bahwa semakin berpendidikan seseorang maka tingkat pendapatannya semakin baik. Hal ini dimungkinkan karena orang yang berpendidikan lebih produktif dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan.
2. Investasi pendidikan memberikan nilai balik (rate of return) yang lebih tinggi daripada nilai investasi fisik dibidang lain. Nilai balik pendidikan adalah perbandingan antara total biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pendidikan dengan total pendapatan yang akan diperoleh setelah seseorang lulus dan memasuki dunia kerja.

3. Investasi dalam bidang pendidikan memiliki banyak fungsi antara lain adalah fungsi teknis-ekonomis, fungsi sosial-kemanusiaan, fungsi politik, fungsi budaya dan fungsi kependidikan.⁴

Namun sayangnya, pertumbuhan ekonomi suatu negara tidaklah selalu mulus. Masalah yang sering dihadapi oleh Negara berkembang seperti Negara Indonesia adalah masalah Inflasi dan Pengangguran. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga barang-barang secara terus menerus dalam satu periode tertentu. Inflasi akan berdampak pula pada tingkat suku bunga sehingga tingkat investasi akan menurun karena para investor tidak banyak yang menginvestasikan modalnya. Sedangkan pengangguran terjadi karena sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia dibandingkan dengan angkatan kerjanya. Apabila inflasi, tingkat suku bunga dan pengangguran suatu Negara tidak terkendali maka kedua masalah tersebut dapat menimbulkan efek yang buruk, baik yang bersifat ekonomi, politik, sosial, lingkungan serta budaya.

Salah satu sektor ekonomi makro adalah sektor investasi, khususnya investasi sektor pendidikan. Konsep pendidikan sebagai sebuah investasi juga telah berkembang secara pesat dan diyakini oleh setiap negara bahwa pembangunan sektor pendidikan merupakan prasyarat kunci bagi pertumbuhan sektor-sektor pembangunan lainnya. Pemikiran ini muncul pada tahun 1960-an ketika pidato Theodore Schultz tahun 1960 yang berjudul "*Investment In Human Capital*" bahwa pembangunan sektor pendidikan dengan manusia

⁴ Drs.Nurkolis,MM dalam Jurnal investasi Pendidikan (www.wordpress/investasipendidikan.co.id) diakses tgl 9 Jan 2012

sebagai fokus intinya telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi tenaga kerja.⁵

Di negara-negara maju, pendidikan selain sebagai aspek konsumtif juga diyakini sebagai investasi modal manusia (*human capital investment*) dan menjadi “leading sector” (sektor utama). Keberhasilan investasi pendidikan berkorelasi dengan kemajuan pembangunan makronya.

Pendidikan adalah tonggak kemajuan bangsa dengan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan handal sehingga mampu membawa kehidupan kearah yang lebih baik. Untuk mewujudkan SDM yang handal dan berkualitas tidaklah mudah, khususnya peran pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah semaksimal mungkin dapat menumbuhkan antusias masyarakat dalam menuntut ilmu mulai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Wajib Belajar (Wajar), Menengah juga Perguruan Tinggi. Untuk dapat melihat potensi dan investasi dalam bidang pendidikan minimal kita melihat dari jumlah pertumbuhan penduduk, pertumbuhan jumlah murid serta mewujudkan sarana dan prasarana seperti mulai dari pembangunan gedung sekolah berikut fasilitasnya, membangun jalur akses yang layak menuju tempat-tempat pendidikan untuk proses belajar mengajar, pengadaan sumber listrik serta tidak lupa ditunjang dengan tenaga pengajar atau pendidik yang harus profesional dibidangnya sehingga mampu memotivasi peserta didik untuk terus unggul dan berkembang.

⁵ Jurnal Ekonomi Pendidikan (www.jurnal/ekonomi/pendidikan.com) diakses tanggal 9 Januari 2012

Pada kenyataannya yang ada saat ini masih banyak bangunan fisik sekolah-sekolah yang masih kurang layak untuk digunakan serta sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti pengadaan buku sekolah dan lain sebagainya untuk berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Fasilitas merupakan salah satu faktor penunjang untuk menghasilkan lulusan-lulusan sekolah yang lebih berpotensi dan berkualitas.

Untuk sarana fisik misalnya, banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. Sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium dan sebagainya.

Data Balitbang Depdiknas (2003) menyebutkan untuk satuan SD terdapat 146.052 lembaga yang menampung 25.918.898 siswa serta memiliki 865.258 ruang kelas. Dari seluruh ruang kelas tersebut sebanyak 364.440 atau 42,12% berkondisi baik, 299.581 atau 34,62% mengalami kerusakan ringan dan sebanyak 201.237 atau 23,26% mengalami kerusakan berat. Kalau kondisi MI diperhitungkan angka kerusakannya lebih tinggi karena kondisi MI lebih buruk daripada SD pada umumnya. Keadaan ini juga terjadi di SMP, MTs, SMA, MA, dan SMK meskipun dengan persentase yang tidak sama.⁶

Dodi Nandika Sekertaris Jendral Depdiknas pada tahun 2005, mengemukakan bahwa masalah dan tantangan yang dihadapi bidang pendidikan di Indonesia antara lain adalah:

1. Tingkat Pendidikan masyarakat yang relatif masih rendah

⁶ Artikel Pendidikan, *Masalah pendidikan di Indonesia* diakses tanggal 11 januari 2015

2. Dinamika perubahan struktur penduduk belum sepenuhnya terakomodasi dalam pembangunan pendidikan.
3. Kesenjangan tingkat pendidikan.
4. Good Governance yang belum berjalan secara optimal.
5. Fasilitas pelayanan pendidikan yang belum memadai dan merata.
6. Kualitas pendidikan relatif rendah dan belum mampu memenuhi kompetensi peserta didik.
7. Pendidikan tinggi masih menghadapi kendala dalam mengembangkan dan menciptakan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi).
8. Manajemen pendidikan belum berjalan secara efektif dan efisien.
9. Anggaran pembangunan pendidikan belum tersedia secara memadai.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan antara PDB dengan Investasi Sektor Pendidikan di Indonesia.
2. Terdapat hubungan antara Tingkat Suku Bunga dengan Investasi Sektor Pendidikan di Indonesia.
3. Terdapat hubungan antara PDB dan Tingkat Suku Bunga dengan Investasi Sektor Pendidikan di Indonesia.

C. Pembatasan Masalah

Berhubung keterbatasan yang dimiliki peneliti dari segi waktu dan hal ini tidak memungkinkan bagi peneliti untuk membahas semua masalah di dalam penelitian ini, maka peneliti membatasi penelitian ini pada masalah “ Hubungan antara PDB dan Tingkat Suku Bunga dengan Investasi Sektor Pendidikan di Indonesia Tahun 1988-2013”.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah penelitian yang dirumuskan adalah:

1. Apakah terdapat hubungan antara PDB dengan Investasi Sektor Pendidikan?
2. Apakah terdapat hubungan antara Tingkat Suku Bunga dengan Investasi Sektor Pendidikan?
3. Apakah terdapat hubungan antara PDB dan Tingkat Suku Bunga dengan Investasi Sektor Pendidikan?

E. Kegunaan Penelitian

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat berguna untuk menambah referensi dan menambah sumber pengetahuan baru tentang PDB dan tingkat suku bunga terhadap investasi sektor pendidikan sehingga penelitian ini dapat menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan, masukan, serta referensi bagi peneliti selanjutnya, serta dapat digunakan sebagai salah satu instrument pemecahan masalah PDB dan tingkat suku bunga terhadap investasi sektor pendidikan.